Penulis:
Umi Rahmi, S.H., M.H., M.Kn | Dr. Heriyanto, S.Sos., M.Si | Fajar Ifan Dolly, S.Sos., M.Si
Dr. Untung Muhdiarta, M.Si | Dr. Hiskia C.M. Sapioper, S.Sos, M.Si | Rhina Pongtuluran, S.IP., M.KP.
Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP. | Chamid Sutikno S.IP., M.Si
Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P. | Muhlin, S.Sos., M.Si

LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

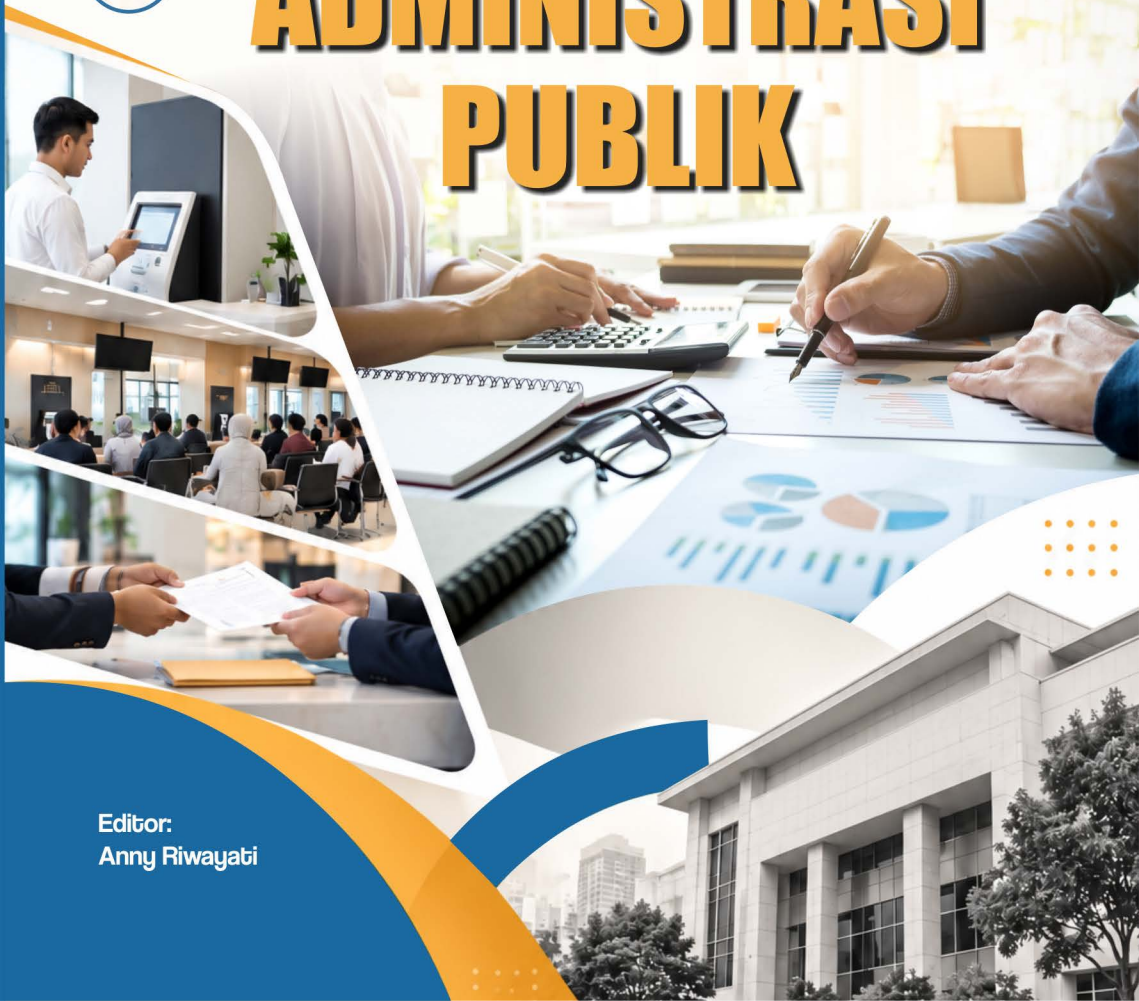

Editor:
Anny Riwayati

LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Umi Rahmi, S.H., M.H., M.Kn | Dr. Heriyanto, S.Sos., M.Si | Fajar Ifan Dolly, S.Sos., M.Si
Dr. Untung Muhdiarta, M.Si | Dr. Hiskia C.M. Sapioper, S.Sos, M.Si | Rhina Pongtuluran, S.IP., M.KP.
Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP. | Chamid Sutikno S.IP., M.Si
Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P. | Muhlin, S.Sos., M.Si

Penerbit Widina

LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis:
Umi Rahmi, S.H., M.H., M.Kn
Dr. Heriyanto, S.Sos., M.Si
Fajar Ifan Dolly, S.Sos., M.Si
Dr. Untung Muhdiarta, M.Si
Dr. Hiskia C.M. Sapioper, S.Sos, M.Si
Rhina Pongtuluran, S.IP., M.KP.
Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP.
Chamid Sutikno S.IP., M.Si
Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P.
Muhlin, S.Sos., M.Si

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Neneng Sri Wahyuni

Editor:
Anny Riwayati

ISBN:
978-634-317-391-5

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Legitimasi dan Akuntabilitas Administrasi Publik ini dapat diselesaikan. Buku ini membahas pentingnya legitimasi dan akuntabilitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah perkembangan administrasi publik dan transformasi digital, pemerintah tidak hanya dituntut memiliki kewenangan yang sah, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui kebijakan, pelayanan, keterbukaan, integritas, dan tanggung jawab.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat dalam memahami dinamika legitimasi dan akuntabilitas administrasi publik. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan yang lebih *legitimate*, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Pontianak, September 2026

SINOPSIS

Mengapa masyarakat menerima dan mempercayai pemerintah? Dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kewenangan, keputusan, serta kebijakan yang dijalankannya? Pertanyaan tersebut menjadi pijakan utama dalam memahami legitimasi dan akuntabilitas administrasi publik.

Di tengah perubahan dari birokrasi hierarkis menuju *New Public Management*, serta berkembangnya pendekatan *public value* dan tata kelola kolaboratif, pemerintah tidak lagi cukup dinilai berdasarkan legalitas kewenangannya. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Legitimasi bukanlah modal kekuasaan yang bersifat tetap, melainkan kepercayaan publik yang harus terus dibangun dan diperbarui melalui setiap keputusan dan tindakan pemerintahan.

Buku Legitimasi dan Akuntabilitas Administrasi Publik mengajak pembaca memahami hubungan antara kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab, integritas aparatur, transparansi, dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, administrasi publik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mencapai hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut dicapai secara sah, bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
SINOPSIS iv
DAFTAR ISI v
BAB 1 KONSEP DASAR LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 1
A. Pendahuluan 1
B. Konsep Dasar Legitimasi 2
C. Konsep Dasar Akuntabilitas 7
D. Hubungan Dasar Legitimasi dan Akuntabilitas 12
BAB 2 EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK 15
A. Pendahuluan 15
B. Konsep Paradigma dalam Administrasi Publik 17
C. Evolusi Paradigma Administrasi Publik 18
D. Kesimpulan 23
BAB 3 PERSPEKTIF TEORI AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 27
A. Pendahuluan 27
B. Konsep Akuntabilitas dalam Administrasi Publik 28
C. Kebijakan Bank Sampah sebagai Upaya Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan 29
D. Perspektif Paradigmatik Akuntabilitas 30
E. Dimensi dan Bentuk Akuntabilitas Publik 32
F. Prinsip dan Mekanisme Akuntabilitas Publik 34
G. Implementasi Akuntabilitas Dalam Administrasi Publik Indonesia 35
H. Pengawasan Pelayanan, Informasi, dan Integritas 36
I. Digitalisasi dan Tantangan Baru Akuntabilitas 37
J. Penutup 38
BAB 4 LEGITIMASI PEMERINTAHAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK 43
A. Pendahuluan 43
B. Konsep Legitimasi Pemerintahan 44

C. Konsep Kepercayaan Publik 45
D. Hubungan Legitimasi Pemerintahan dan Kepercayaan Publik 46
E. Faktor-Faktor Pembentuk Kepercayaan Publik 46
F. Pengukuran Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah 47
G. Krisis Legitimasi Pemerintahan 48
H. Strategi Membangun Kepercayaan Publik 49
I. Studi Kasus Indonesia: Penguatan Legitimasi melalui Reformasi Administrasi Publik 50
J. Penutup 51

BAB 5 KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGUATAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN 55

A. Pendahuluan 55
B. Konsep Kebijakan Publik 56
C. Konsep Legitimasi Pemerintahan 58
D. Hubungan Kebijakan Publik dengan Legitimasi Pemerintahan 59
E. Indikator Utama dalam Siklus Kebijakan Publik 60
F. *Good Governance* sebagai Dasar Penguatan Legitimasi 60
G. Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia 61
H. Tantangan Penguatan Legitimasi di Indonesia 62
I. Strategi Penguatan Legitimasi Pemerintahan 62
J. Penutup 63

BAB 6 TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 65

A. Pendahuluan 65
B. Konsep Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik 67
C. Landasan Hukum Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik 69
D. Implementasi Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik 70
E. Tantangan dan Strategi Penguatan Transparansi 72
F. Penutup 75

BAB 7 PELAYANAN PUBLIK, KINERJA ORGANISASI, DAN LEGITIMASI PEMERINTAH 77

A. Pendahuluan 77

B. Pelayanan Publik 80
C. Kinerja Organisasi Publik 82
D. Legitimasi Pemerintah 84
E. Penutup 86
BAB 8 KEPEMIMPINAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PEMERINTAH 91
A. Pendahuluan 91
B. *Strategic Thinking* dan Strategi Transformasional dalam Kepemimpinan Publik 93
C. Akuntabilitas Organisasi Pemerintah 95
D. Akuntabilitas, Integritas, dan Etika dalam Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah 98
E. Kesimpulan 102
BAB 9 TRANSFORMASI DIGITAL DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER 109
A. Pendahuluan: Makna Transformasi Digital dalam Sektor Publik 109
B. Dari *E-Government* menuju *Digital Governance* 110
C. Implikasi Transformasi Digital *Governance* terhadap Legitimasi Rasional-Legal 111
D. Akuntabilitas Algoritmik: Menjawab Tantangan *"Black Box"* dan Bias Kecerdasan Buatan (AI) 112
E. Digitalisasi sebagai Instrumen Penguatan Legitimasi Pemerintahan 114
F. Tantangan Administrasi Publik Kontemporer di Era Digital 115
G. Konteks dan Praktik di Indonesia: Mengurai Kompleksitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 116
H. Penutup dan Kesimpulan 117
BAB 10 MASA DEPAN LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 123
A. Pendahuluan 123
B. Legitimasi Publik dalam Pemerintahan Digital 124
C. Transformasi Digital dan Tata Kelola Data 125

D. Akuntabilitas, Transparansi, dan Ketertelusuran 126
E. Kecerdasan Buatan, Data Pribadi, dan Etika 127
F. Inklusi, Kapasitas Birokrasi, dan Kepemimpinan 128
G. Model dan Agenda Strategis Indonesia 129
H. Penutup 130
BIODATA PENULIS 135

1

KONSEP DASAR LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Umi Rahmi, S.H., M.H., M.Kn
Perkumpulan Praktisi Hukum Perempuan Indonesia

A. PENDAHULUAN

Dalam ranah administrasi publik, pelaksanaan kewenangan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sehingga tidak cukup hanya bertumpu pada struktur tata usaha atau organisasi semata. Penggunaan kewenangan menuntut dasar pengakuan serta sistem pertanggungjawaban yang jelas. Di sinilah legitimasi dan akuntabilitas hadir sebagai dua pilar konseptual yang fundamental. Legitimasi berfokus pada alasan mengapa kewenangan publik dianggap sah dan patut dipatuhi, sedangkan akuntabilitas menitikberatkan pada kewajiban pemegang kewenangan untuk menguraikan tindakan, proses, dan hasil kerjanya kepada pihak penilai.

Dalam praktiknya, legitimasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemenuhan syarat formal. Yunus dan Tamma menegaskan hal ini secara spesifik:

> "*Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions*."
> (Yunus & Tamma, 2014, hlm. 27)

Kutipan tersebut menggarisbawahi fungsi praktis dari legitimasi; bahwa keabsahan tidak cukup diukur dari kewenangan jabatan saja. Harus ada justifikasi yang masuk akal dan selaras dengan kerangka hukum maupun nilai sosial agar tindakan aparatur dapat diakui secara wajar oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Beetham, D. (1991). *The legitimation of power*. Macmillan.

Black, J. (2007). *Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes* (IILJ Working Paper 2007/12, Global Administrative Law Series). New York University School of Law.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Habermas, J. (1988). *Legitimation crisis* (T. McCarthy, Trans.). Polity Press. (Original work published 1973)

Revida, E., Aisyah, S., Pardede, A. F., Purba, S., Hidayatulloh, A. N., Leuwol, N. V., Arfandi, S. N., Kato, I., Silalahi, M., & Manullang, S. O. (2021). *Manajemen pelayanan publik*. Yayasan Kita Menulis.

Sawir, M. (2022). *Akuntabilitas organisasi publik: Konseptual dan praktik*. Deepublish.

Schillemans, T., & Bovens, M. (2011). The challenge of multiple accountability: Does redundancy lead to overload? In M. J. Dubnick & H. G. Frederickson (Eds.), *Accountable governance: Problems and promises* (pp. 3–21). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315706771-9

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Yunus, R., & Tamma, S. (2014). Importance of cultural legitimacy to the local government in Indonesian democracy. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 21*(1), 27–34.

2

EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Heriyanto, S.Sos., M.Si
Politeknik Negeri Pontianak

A. PENDAHULUAN

Administrasi publik terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan disiplin yang dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan tantangan pemerintahan. Sejak Woodrow Wilson memperkenalkan gagasan pemisahan administrasi dan politik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan profesional, cara pandang terhadap peran negara, warga negara, dan pelayanan publik terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, memahami administrasi publik tidak cukup hanya melihat praktik saat ini, tetapi juga perlu memahami evolusi pemikirannya.

Perubahan paradigma semakin pesat sejak dekade 1980-an ketika krisis fiskal di berbagai negara melahirkan *New Public Management* (NPM). Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintahan. Meskipun menuai kritik, NPM tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan modern.(Dan, S., Lægreid, P., & Špaček, 2024).

Seiring waktu, berbagai kelemahan NPM mulai terlihat, terutama karena paradigma ini cenderung memandang masyarakat sebagai konsumen layanan dan kurang memberi perhatian pada nilai-nilai demokrasi serta partisipasi publik. Kritik tersebut kemudian melahirkan paradigma baru yang lebih menekankan keterlibatan warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Nguyen, H., Drejer, I., &

DAFTAR PUSTAKA

Ambrose, G., & Siddiki, S. (2024). *Assessing drivers of sustained engagement in collaborative governance arrangements. Journal of Public Administration Research and Theory, 34(4), 498–514. https://doi.org/10.1093/jopart/muae005*.

Bouckaert, G. (2023). *The neo-Weberian state: From ideal type model to reality? Max Weber Studies, 23(1), 13–59. https://doi.org/10.1353/max.2023.0002*.

Cho, B. (2023). *Bibliometric analysis of academic papers citing Dunleavy et al.'s (2006) "New public management is dead long live digital-era governance": Identifying research clusters and future research agendas. Administration & Society, 55(5), 892–920. https://doi.org*.

Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Gil-Garcia, J. R. (2025). *Artificial intelligence and public administration: Understanding actors, governance, and policy from micro, meso, and macro perspectives. Public Policy and Administration, 40(2), 173–184. https://doi.org/10.1177/09520767241272921*.

Dan, S., Lægreid, P., & Špaček, D. (2024). *NPM reconsidered: Towards the study of enduring forms of NPM. Public Management Review, 26(9), 2531–2541. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2375561*.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0033-3352.00117*.

Dunleavy, P., & Margetts, H. (2023). *Data science, artificial intelligence and the third wave of digital era governance. Public Policy and Administration, 40(2), 185–214. https://doi.org/10.1177/09520767231198737*.

Knox, C. C., Haupt, B., & Lehman, D. (2026). *Is climate change a wicked or ignored problem? Insights from mainstream public administration literature. Public Administration Quarterly. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/07349149261417620*.

Krogh, A. H., & Triantafillou, P. (2024). *Developing New Public Governance as a public management reform model. Public Management Review, 26(10), 3040–3056. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2313539*.

Madan, R., & Ashok, M. (2023). *AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. Government Information Quarterly, 40(1), 101774. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101774*.

Nguyen, H., Drejer, I., & Marquès, P. (2024). *Citizen engagement in public sector innovation: Exploring the transition between paradigms. Public Management Review, 26(12), 3622–3642. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2347360*.

Scupola, A., & Mergel, I. (2022). *Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark. Government Information Quarterly, 39(1), 101650. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101650*.

Thabit, S., Sancino, A., & Mora, L. (2025). *Strategic public value(s) governance: A systematic literature review and framework for analysis. Public Administration Review, 85(3), 885–906. https://doi.org/10.1111/puar.13877*.

Waara, Å. (2025). *Examining digital government maturity models: Evaluating the inclusion of citizens. Administrative Sciences, 15(3), Article 73. https://doi.org/10.3390/admsci15030073*.

3

PERSPEKTIF TEORI AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Fajar Ifan Dolly, S.Sos., M.Si
Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

A. PENDAHULUAN

Dinamika administrasi publik telah bergeser dari birokrasi hierarkis ke *New Public Management*, hingga kini mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada nilai publik dan kolaborasi. Perubahan paradigma ini turut meredefinisi makna akuntabilitas publik; akuntabilitas tidak lagi cukup dimaknai sebagai kepatuhan administratif atau pemenuhan prosedur semata, melainkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keputusan, merespons kebutuhan masyarakat, dan memastikan kekuasaan digunakan demi kemaslahatan publik.

Memahami akuntabilitas sebagai sebuah proses sosial, Bovens (2007) mendefinisikannya sebagai hubungan interaktif antara aktor yang memberi penjelasan dan forum yang berhak menilai serta memberikan konsekuensi (Bovens, 2007). Berpijak dari pandangan tersebut, bab ini menguraikan konsep, teori, dimensi, hingga penerapan akuntabilitas publik di Indonesia, seraya menunjukkan bahwa pelbagai model akuntabilitas mulai dari kepatuhan hingga kolaborasi sejatinya saling melengkapi dalam praktik pemerintahan modern.

Penulisan bab ini menjadi kian krusial di tengah tantangan tata kelola yang semakin kompleks, seperti penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan, tata kelola berbasis jejaring, serta isu keberlanjutan. Pada akhirnya, pembahasan ini mempertegas inti dari akuntabilitas publik yang tidak pernah berubah: memastikan agar

DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Mitnick, B. M. (2015). Agency Theory. In *Wiley Encyclopedia of Management* (pp. 1–6). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020097

Moore, M. H. (1997). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard university press.

Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, *78*(3), 555–573. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218

OECD Public Integrity Handbook. (2020).

Osborne, S. P. (2006). *The new public governance? 1*. Taylor & Francis.

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, *47*(3), 227–238. http://www.jstor.org/stable/975901

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Routledge.

Schillemans, T. (2011). Does Horizontal Accountability Work?: Evaluating Potential Remedies for the Accountability Deficit of Agencies. *Administration \& Society*, *43*(4), 387–416. https://doi.org/10.1177/0095399711412931

Thoha, M. (2017). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prandamedia Kencana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4

LEGITIMASI PEMERINTAHAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Dr. Untung Muhdiarta, M.Si.
Universitas Cenderawasih

A. PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi publik menunjukkan perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan legalitas kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma dari *Old Public Administration* menuju *New Public Management* dan kemudian *New Public Governance* telah mengubah orientasi penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan birokratis menuju tata kelola (*governance*) yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan penciptaan nilai publik (*public value*) (Osborne, 2010; Bevir, 2011; Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam konteks tersebut, legitimasi pemerintahan tidak lagi hanya bertumpu pada legalitas konstitusional, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Beetham, 2013).

Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tingginya kepercayaan masyarakat mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat implementasi program pemerintah, sedangkan menurunnya

DAFTAR PUSTAKA:

Beetham, D. (2013). *The Legitimation of Power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

Bevir, M. (2011). *The SAGE Handbook of Governance*. Sage Publications.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468.

Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of good governance. *International Review of Administrative Sciences, 69*(3), 329–343.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.

Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.

Haning, M. T., dkk. (2024). *Kepercayaan Publik dan Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik*. Makassar: Penerbit Unhas Press.

Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage Publications.

OECD. (2022). *Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions*. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.

Pierre, J., & Peters, B. G. (2021). *Governance, Politics and the State* (2nd ed.). Red Globe Press.

Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies, 44*(4), 652–667.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.

5

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGUATAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN

Dr. Hiskia C.M. Sapioper, S.Sos, M.Si
Universitas Cenderawasih

A. PENDAHULUAN

Dinamika tata kelola pemerintahan era modern menuntut pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Keberhasilan dan keberlanjutan suatu rezim pemerintahan saat ini tidak lagi sekadar diukur dari aspek keabsahan formal-konstitusional yang diperoleh melalui proses pemilu. Lebih dari itu, indikator utama keberhasilan bergeser pada kapasitas nyata pemerintah dalam merumuskan serta mengeksekusi kebijakan publik yang responsif terhadap problem aktual warga negara. Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik merupakan instrumen utama eksistensi negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus sebagai pilar penopang kepercayaan publik.

Oleh karena itu, mutu dari kebijakan publik yang dihasilkan menjadi penentu esensial bagi kokoh atau rapuhnya legitimasi suatu pemerintahan. Kebijakan publik secara mendasar merupakan keputusan sistematis yang diambil untuk mengatasi persoalan bersama. Ketika instrumen ini berjalan efektif, apresiasi publik akan meningkat. Sebaliknya, ketidakmampuan instrumen ini merespons problem riil dapat memicu degradasi kepercayaan yang berujung pada krisis legitimasi politik secara menyeluruh.

Dalam diskursus administrasi publik kontemporer, legitimasi dianalisis tidak hanya sebagai produk legal formal, melainkan sebagai sebuah hasil kinerja yang dinamis (*performance legitimacy*). Pemerintah akan mendapatkan pengakuan dan kepatuhan sukarela secara konsisten jika mampu memperlihatkan kinerja tata Kelola yang

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public

Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Davies, H. T. O., Nutley, S. M., & Smith, P. C. (2004). What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services. Bristol: Policy Press.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Boston: Pearson.

Frederickson, H. G. (1997). The Spirit of Public Administration. San Francisco: Jossey-Bass.

Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. London: Sage Publications.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland (3rd ed.). Berkeley: University of California Press.

Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

6

TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Rhina Pongtuluran, S.IP., M.KP.
Universitas Yapis Papua

A. PENDAHULUAN

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam era reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi, masyarakat semakin menuntut penyelenggara negara untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak konstitusional setiap warga negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan (Rahimallah & Ricky, 2023).

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjadi landasan hukum bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan akuntabel (Indonesia, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, *16*(01), 1–11. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869

Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, *6*(02), 639–658. https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398

Ismawan, D., & Irma, A. (2024). Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 158–175. https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.70

Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, *4*(1), 131–146. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3859

Lestari, N. M., Widnyani, I. A. P. S., & Dewi, N. D. U. (2023). Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, *3*(2), 76–82. https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.76-82

Metelli, F., Da Pos, O., & Cavedon, A. (1985). Balanced and unbalanced, complete and partial transparency. *Perception & Psychophysics*, *38*(4), 354–366. https://doi.org/10.3758/BF03207164

Paruntu, N. K., & Silalahi, W. (2025). Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup KementerianDalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN). *Jurnal Usm Law Review*, *8*(2), 1088–1106. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12264

Paunov, Y., Vogel, T., Ingendahl, M., & Wänke, M. (2022). Transparent by choice: Proactive disclosures increase compliance with digital defaults. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.981497

Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(2), 62–75. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911

Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *5*(1), 313–323. https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302

Saputra, W. N., Ema, I., Sari, I. N., & Ramadhani, Q. T. (2025). Trasformasi Birokrasi Digital dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan E-Government. *Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, *3*(2), 82–94. https://doi.org/10.56244/sosiera.v3i2.868

Supyansuri, S. H. (2025). Analisis Redesain Kelembagaan Komisi Informasi Melalui Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Bappenas Working Papers*, *8*(2), 157–180. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.408

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (1945). https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008

Widiastuti, I. (2025). *Birokrasi Dan Public Governance*. Media Kunkun Nusantara.

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.

7

PELAYANAN PUBLIK, KINERJA ORGANISASI, DAN LEGITIMASI PEMERINTAH

Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP.
Universitas W.R. Supratman

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan ruang utama interaksi negara dengan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan menjadi ukuran nyata kehadiran pemerintah, bukan sekadar kewenangan formal (Osborne, 2018). Pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan melalui prosedur yang mudah, kepastian waktu, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, serta respons aparatur mencerminkan kemampuan pemerintah menciptakan nilai publik, (Osborne, 2018). Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif belaka, tetapi juga dipahami sebagai proses institusional yang membentuk hubungan antara negara dengan masyarakat (Osborne et al., 2013).

Kualitas pelayanan mencerminkan kapasitas organisasi publik dalam mengelola kewenangan, sumber daya, kompetensi aparatur, teknologi, dan koordinasi (Yang et al., 2024). Pelayanan yang andal menunjukkan organisasi bekerja secara terintegrasi, sedangkan keterlambatan, ketidakpastian, diskriminasi, dan lemahnya penanganan pengaduan mengindikasikan persoalan pada proses, kepemimpinan, budaya organisasi, maupun sistem akuntabilitas (Zada et al., 2023). Oleh sebab itu, kinerja organisasi perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan manfaat, pemerataan, responsivitas, dan nilai publik, bukan semata penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan (Behn, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

Arif, I., & Dutta, N. (2024). Legitimacy of government and governance. *Journal of Institutional Economics*, *20*, 1–23. https://doi.org/10.1017/S1744137423000334

Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, *63*(5), 586–606. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322

Berg, M., & Johansson, T. (2020). Building institutional trust through service experiences - Private versus public provision matter. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *30*(2), 290–306. https://doi.org/10.1093/jopart/muz029

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

De Fine Licht, J., Agerberg, M., & Esaiasson, P. (2022). It's Not Over When It's Over" - Post-Decision Arrangements and Empirical Legitimacy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *32*(1), 183–199. https://doi.org/10.1093/jopart/muab023

Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2022). Legitimacy of Algorithmic Decision-Making: Six Threats and the Need for a Calibrated Institutional Response. *Perspectives on Public Management and Governance*, *5*(3), 232–242. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvac008

Hood, C. (1991). a Public Management for All Seasons? *Public Administration*, *69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 99 (2014). http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 14 (2014).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pub. L. No. 14 Tahun 2017, 1 (2017). https://doi.org/10.1016/0014-4827(75)90518-2

Lund-Tønnesen, J., & Christensen, T. (2023). The dynamics of governance capacity and legitimacy: the case of a digital tracing technology during the COVID-19 pandemic. *International Public Management Journal*, *26*(1), 126–144. https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2112328

Mark C. Suchman. (1995). Managing legitimacy: Strategic and Innovative Approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571–610. https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Meijer, A. J. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *Public Administration*, *73*(3), 429–439. https://doi.org/10.3726/978-3-653-01498-3

Meng, X., & Li, C. (2025). Does public sector performance information impact stakeholders? Evidence from a meta-analysis. *Public Administration Review*, *85*(4), 1086–1097. https://doi.org/10.1111/puar.13924

Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: are public service organizations capable of co-production and value co-creation? *Public Management Review*, *20*(2), 225–231. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461

Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, *43*(2), 135–

158. https://doi.org/10.1177/0275074012466935

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, *64*(1), 12–40. https://www.proquest.com/openview/7d007e04d78261295e5524f15bef6837/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41988

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25, 1 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

Rimkutė, D., & Mazepus, H. (2025). Citizens' perceptions of the legitimacy of independent agencies: The effects of expertise-based and reputation-sourced authority. *Public Administration Review*, *85*(5), 1495–1511. https://doi.org/10.1111/puar.13916

Robert B, Denhardt, J. V. D. (2000). *The N ew Public Service : Serving Rather than Steering*. *60*(6), 549–559. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117

Siti-Nabiha, A. K., Djamhuri, A., & Amirya, M. (2023). Does performance management system implementation reduce fragmentation in an Indonesian local government? *Chinese Public Administration Review*, *14*(4), 269–281. https://doi.org/10.1177/15396754231204312

Van Den Bekerom, P., Van Der Voet, J., & Christensen, J. (2021). Are Citizens More Negative About Failing Service Delivery by Public Than Private Organizations? Evidence From a Large-Scale Survey Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *31*(1), 128–149. https://doi.org/10.1093/jopart/muaa027

van der Kolk, B. (2022). Performance measurement in the public sector: Mapping 20 years of survey research. *Financial Accountability and Management*, *38*(4), 703–729. https://doi.org/10.1111/faam.12345

Van Ryzin, G. G. (2004). Expectations, performance, and citizen satisfaction with urban services. *Journal of Policy Analysis and Management*, *23*(3), 433–448. https://doi.org/10.1002/pam.20020

Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, *208*(September), 123722. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722

Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. *Heliyon*, *9*(5), e15543. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543

Zhang, J., Li, H., & Yang, K. (2022). A Meta-Analysis of the Government Performance—Trust Link: Taking Cultural and Methodological Factors into Account. *Public Administration Review*, *82*(1), 39–58. https://doi.org/10.1111/puar.13439

8

KEPEMIMPINAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PEMERINTAH

Chamid Sutikno S.IP., M.Si
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan menjadi salah satu komponen utama dalam suatu lembaga organisasi yang menjalankan aktivitas/kegiatan yang bersifat untuk mengatur dan mengarahkan kelompok atau individu mulai dari merencanakan sesuatu sampai dengan mengevaluasinya agar pelembagaan organisasi menjadi lebih baik. (Ali, et.al, 2022). Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam lingkungan organisasi tentu pemimpin yang memiliki karakter tersendiri dan peran penting dalam menjalankan roda kegiatan organisasi (Daswati, 2023).

Adapun pendekatan dalam kepemimpinan harus mampu membangun seperti *Self Leadership, Team Leadership,* dan *Organizational Leadership. Self Leadership* dapat diartikan sebagai pemimpin yang mampu mengatur dan mengontrol diri sendiri supaya dapat menemukan model penentuan dalam arah kebijakan. *Team Leadership* merupakan pemimpin yang dapat mengatur ataupun mengarahkan sesuai dengan kehendak. *Organizational Leadership* dapat diartikan sebagai bentuk pemimpin yang mampu memimpin kelompok atau individu dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan (Tytarenko, 2020, Shorobura and Dolynska, 2023).

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi bisa disebut dengan kata *team leader* yang secara otomatis pemimpin memiliki tugas dan peran yang harus ditanggungjawab dan mampu memberikan segala

DAFTAR PUSTAKA

Albow, Martin, (2007). *Birokrasi.* Tiara Wacana. Yogyakarta.

Ali, Asim, Taha Shabbir, Waqar Ali, (2022). *A Literature Review on Public Leadership in Organizations,* International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership.

Alkaabi, Seema, Joe Hazzam, Stephen Wilkins & Sorin Dan, (2024). *The Influences of Ambidexterity, New Public Management and Innovation on the Public Service Quality of Government Organizations*.

Amstrong, Elia, 2015. *Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues*. United Nations.

Arianti, Pariadi, (2014). *Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Di Pemerintah Daera*h (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng).

Balansa, F., Lengkong, & Hasan, A. B. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan disiplin kerja pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Karombasan. *Jurnal EMBA, 5*(3), 4555-4564.

Bhuiyan, (2013). *Quest for Administrative Ethics in An Enemy of the People.* Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh. Sociology.

Callens, Chesney, (2023). *User Involvement as a Catalyst for Collaborative Public Service Innovation*. Journal of Public Administration Research and Theory, 2023, 33, 329–341 https://doi.org/10.1093/jopart/muac030

Chen, Wenna, (2019). *Portable Innovation, Policy Wormholes, and Innovation Diffusion*. Public Administration Review.

Christian, Schuster, Javier Fuenzalida and Kim Sass Mikkelsen, (2024). *Unethical leadership, moral compensation, and ethical followership: Evidence from a survey experiment with Chilean public servants*. DOI: 10.1111/puar.13815

Creso, et.al (2013). *Accountability, Performance Assessment, And Evaluation: Policy Pressures And Responses From Research Councils*. Research pp. 105–117 doi:10.1093/reseval/rvs041.

Daswati, Syahruddin Hattab, Musdalifa, SarSalbia, (2023). *Bibliometric Analysis of the Role of Leadership in Public Organizations using VosViewer*, International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership.

Dominik, Artur Reuber and Rick Vogel, (2020). *Developing a short scale to assess public* leadership, DOI: 10.1111/padm.12665.

Farstad, Fay M., (2022). *Explaining radical policy change: Norwegian climate policy and the ban on cultivating peatlands*. Global Environmental Change 74 (2022) 102517.

Fialho, Elisabete, Maria José Sousa and Ana Moreira, (2023). *Public Administration Leadership and Public Policies,* Management Leadership and Governance, ECMLG.

Filho, Clóvis, Fabricio Stocker and Ana Maria Machado Toaldo,(2020). *Public service performance from the perspective of marketing and innovation capabilities*. Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2020.1856402.

Hanif, Sadia, Ali Ahsan and Graham Wise, (2022). *Icebergs of Expertise-Based Leadership: The Role of Expert* Leaders in Public Administration.

Hartley, Jean, (2020). *Leadership for public value: Political astuteness as a conceptual link Symposium introductio*n**,** School of Social and Political Sciences, University of Lincoln, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Hashem, Reem, (2022). '*Al Faza'a leadership: An implicit cultural barrier to distributed leadership in Jordanian public schools*. Educational Management Administration & Leadership, DOI: 10.1177/1741143220932580.

Hoek, (2024). *Joining in With Leadership? A Survey of Leadership Behaviour and Identity of Non-Managerial Employees in Public Organizations*, Review of Public Personnel Administration.

Koppell, Jonathan GS., (2005). *Pathologies of accountability*: *ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder"*. Public Administration Review.

Kwee Ng, Boon, Chan-Yuan Wong and Mary Grace P. Santos, (2022). *Grassroots innovation: Scenario, policy and governance,* Journal of Rural Studies 90 (2022) 1–12.

Liu, Louis C., (2021). *Policy innovation and public organizational performance: a moderated mediation analysis of Taiwan's Bookstart program*, Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2021.1942530.

Majer, Chol Gabriel, (2023). *Influence Of Leadership Style Of Management On Managerial Strategy In South Sudan Public Sector*, International Journal of Scientific and Research Publications.

Manaze, Mesfin, (2022). *Practice Challenges of Distributed Leadership at Public Secondary Schools of Dessie City Administration*, *Asian Journal of Education and e-Learning (ISSN: 2321 – 2454)*

Norman, Kristen. 2017. *Balancing the Four Es; or Can We Achieve Equity for Social Equity in Public Administration*. Journal of Public Affairs Education.

Patterson, Eric and Renu Agarwal, (2023). *Reducing the gap between rhetoric and reality: Use of Digital Service Standards for public service innovation through digital transformation in Australia*. Aust J Publ Admin. 2023;82:557–589.

Perry, Tom, (2015). *From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries* (medical services at Tonga's Vaiola Hospital) Global Centre for Public Service.

Plattner, Marc F., (2013). *Reflections on "Governance"* National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

Rick Vogel, Laura Werkmeister, (2020). *What is Public about Public Leadership: Exploring Implicit Public Leadership Theories*, *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Robinson, Mark, (2015). *From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries*. UNDP Global Centre for Public Service.

Shorobura and Dolynska, (2023). *Leadership in public administration: today's challenges*, DOIhttp://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.13.02.043,https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/42766.

Shilong, Wang,.(*Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective. Open Journal of Social Sciences, 2, 263-2. 2014. School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University.*

Siciliano, Michael D. , (2016). *Ignoring the Experts: Networks and Organizational Learning in the Public Sector*, *J Public Adm Res Theory (2016) doi: 10.1093/jopart/muw05.*

Tytarenko,Oleksandr (2020). *Features Of The Influence Of Local Leadership On Public Administration: European Experience For Ukraine*, *Public Administration and Regional Development» https://pard.mk.ua/index.php/journal.*

Wang, Huanming, Bin Chen, Wei Xiong, Liuhua Yang & Dajian Zhu, (2019). *Multiple Pathways to Public-Private Partnerships for Urban Public Service Delivery: A Cross- City Comparison of Bicycle-Sharing Service in China, Urban Policy and Research*. DOI: 10.1080/08111146.2019.166372.

Weckstroma, Christoffer and Miloˇs N. Mladenovi, (2020). E*valuation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic cities*. Transportation Research Procedia 45 (2020) 979–986.

Wellstead, Adam and Michael Howlett, (2024). Public value and procedural policy instrument specifications in “design for service. Policy Design anD Practice 2024, Vol. 7, no. 2, 144–157.

Wijayanto,(2010). *Korupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Witesman, Eva M., Lawrence Walters adn Robert K. Christensen, (2023). *Creating a public service topology: Mapping public service motivation, public service ethos, and public service values*. Public Administration published by John Wiley & Sons Ltd.

9

TRANSFORMASI DIGITAL DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER

Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P.
Universitas Djuanda

A. PENDAHULUAN: MAKNA TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SEKTOR PUBLIK

Transformasi digital dalam administrasi publik kontemporer bukan sekadar tentang digitalisasi dokumen atau otomatisasi layanan, melainkan menuntut perubahan menyeluruh pada institusi dan budaya kerja. Birokrasi harus bergeser dari hierarki yang kaku menjadi organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif, dengan menjadikan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (Janowski, 2015; Mergel et al., 2019; Vial, 2019). Perubahan ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk merespons ekspektasi masyarakat digital terhadap layanan publik yang cepat dan transparan layaknya sektor swasta, guna mencegah terkikisnya kepercayaan publik (Twizeyimana & Andersson, 2019). Pada akhirnya, transformasi ini bermuara pada pergeseran paradigma menuju tata kelola yang lebih humanis, di mana pemerintah hadir sebagai penyedia platform yang menempatkan warga negara sebagai mitra strategis demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel (Bannister & Connolly, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly, 31*(1), 119–128. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly, 27*(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001

Brown, A., Fishenden, J., Andrews, P., & Ward, M. (2017). The paradox of agile digital government: A case study of the UK. *Government Information Quarterly, 34*(4), 740–752. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.006

Busuioc, M. (2021). Algorithmic accountability: What for? The public administration viewpoint. *Public Administration Review, 81*(5), 825–838. https://doi.org/10.1111/puar.13299

Cordella, A., & Paletti, A. (2019). ICTs and value creation in public sector: Manufacturing logic vs service logic. *Information and Organization, 29*(4), 100269. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.100269

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 16*(3), 467–494. https://doi.org/10.1093/jopart/mui057

Ebbers, W. E., Jansen, M. G. A. M., & van Deursen, A. J. A. M. (2016). Impact of the digital divide on e-government: Expanding from channel choice to channel usage. *Government Information Quarterly, 33*(4), 685–692. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.007

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review, 20*(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly, 32*(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S., & Janowski, T. (2020). Data governance: Organizing data for trustworthy Artificial Intelligence. *Government Information Quarterly, 37*(3), 101493. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101493

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management, 29*(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

Lindgren, I., & Jansson, G. (2013). Electronic services in the public sector: A conceptual framework. *Government Information Quarterly, 30*(2), 163–172. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.10.005

Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions. *Government Information Quarterly, 31*(4), 545–555. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.001

Meijer, A. (2014). Transparency. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford handbook of public accountability* (pp. 507–524). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0036

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012). The influence of external institutional pressures on local e-government adoption and implementation: A co-evolutionary perspective. *Transforming Government: People, Process and Policy, 6*(4), 376–398. https://doi.org/10.1108/17506161211267491

Perez-Morote, R., Pontones-Rosa, C., & Nunez-Chicharro, M. (2020). The effects of e-government evaluation, trust and the digital divide in the levels of e-government use in European countries. *Technological Forecasting and Social Change, 154*, 119973. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119973

Pratama, A. B. (2020). E-government in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Studi Pemerintahan, 11*(2), 223–251. https://doi.org/10.18196/jgp.112117

Ruijer, E., Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2017). Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use. *Government Information Quarterly, 34*(1), 45–52. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.01.001

Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International Journal of Information Management, 60*, 102356. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government: A literature review. *Government Information Quarterly, 36*(2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001

Venkatesh, V., Thong, J. Y., Chan, F. K., & Hu, P. J. (2016). Managing citizens' uncertainty in e-government services: The mediating and moderating roles of transparency and trust. *Information Systems Research, 27*(1), 87–111. https://doi.org/10.1287/isre.2015.0612

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems, 28*(2), 118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. *Journal of Public Administration Research and Theory, 15*(3), 371–391. https://doi.org/10.1093/jopart/mui021

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector: Applications and challenges. *International Journal of Public Administration, 42*(7), 596–615. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103

10

MASA DEPAN LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Muhlin, S.Sos., M.Si
Universitas Tompotika Luwuk

A. PENDAHULUAN

Administrasi publik abad ke-21 tidak lagi dinilai hanya dari kepatuhan birokrasi terhadap aturan. Masyarakat juga menuntut pelayanan yang cepat, terbuka, aman, mudah digunakan, dan mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Transformasi digital memperluas kapasitas pemerintah melalui integrasi layanan, pemanfaatan data, dan komunikasi langsung dengan warga, tetapi sekaligus menghadirkan risiko fragmentasi aplikasi, kebocoran data, keputusan algoritmik yang sulit dipahami, serta eksklusi kelompok dengan keterbatasan akses. Karena itu, digitalisasi harus dipahami sebagai perubahan tata kelola dan hubungan negara-warga yang berorientasi pada nilai publik, bukan sekadar pengadaan teknologi (Haug et al., 2024; Tangi et al., 2021).

Bab ini membahas masa depan legitimasi dan akuntabilitas dalam administrasi publik dengan pemerintahan digital sebagai konteks utama. Fokusnya meliputi pergeseran sumber legitimasi, tata kelola data, ketertelusuran keputusan, kecerdasan buatan, pelindungan data pribadi, inklusi digital, kapasitas birokrasi, dan agenda strategis Indonesia. Argumen utamanya adalah bahwa teknologi hanya memperkuat pemerintahan apabila meningkatkan nilai publik, menjaga keadilan, melindungi hak warga, menyediakan ruang keberatan, serta

DAFTAR PUSTAKA

Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. Financial Accountability & Management, 38(2), 152-176. https://doi.org/10.1111/faam.12301

Eom, S. J., & Lee, J. (2022). Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction. Government Information Quarterly, 39(2), 101690. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101690

Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: A case of Indonesia. Digital Policy, Regulation and Governance, 23(6), 598-616. https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046

Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. Public Management Review, 26(7), 1963-1987. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917

Levy, K., Chasalow, K. E., & Riley, S. (2021). Algorithms and decision-making in the public sector. Annual Review of Law and Social Science, 17, 309-334. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041221-023808

Matheus, R., Janssen, M., & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government. Government Information Quarterly, 38(1), 101550. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550

OECD. (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Rahmadany, A. F. (2021). Literature study of electronic government implementation in the perspective of Indonesia's electronic government ranking dimensions. Jurnal Bina Praja, 13(2), 281-292. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.281-292

Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. International Journal of Information Management, 60, 102356. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356

United Nations. (2024). United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

van Noordt, C., & Misuraca, G. (2022). Artificial intelligence for the public sector: Results of landscaping the use of AI in government across the European Union. Government Information Quarterly, 39(3), 101714. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101714

Wargadinata, E. L., & Tendean, N. R. P. (2024). Amidst the euphoria of digitalization public services in municipal government: Raising public acceptance. Jurnal Bina Praja, 16(2), 335-346. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.335-346

World Bank. (2022). GovTech maturity index 2022 update: Trends in public sector digital transformation. World Bank.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

BIODATA PENULIS

Umi Rahmi, S.H., M.H., M.Kn.



Penulis lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 19 Januari 1987. Jenjang Pendidikan S1 Sarjana Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pendidikan S2 Magister Kenotariatan ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dr. Heriyanto, S.Sos., M.Si



Penulis adalah dosen di Politeknik Negeri Pontianak yang mendedikasikan diri pada pengembangan ilmu administrasi publik. Lahir di Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Perjalanan akademik penulis bermula dari gelar Sarjana (S1) di STIA Satya Negara Palembang (2007), Magister (S2) di Universitas Sjakhyakirti (2017), hingga meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar pada 2025. Sebagai wujud kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, penulis aktif menulis dan menerbitkan buku referensi sejak tahun 2020, diawali dengan *Dasar-Dasar Public Relation*. Karya tersebut kemudian berkembang melalui *Pendidikan Kewarganegaraan* dan *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (2022), *Dasar-Dasar Presentasi* (2023), *Otonomi Daerah dan Good Governance* serta *Digital Marketing* (2024), diikuti berbagai buku referensi pada 2025, seperti *Administrasi Perbekalan*, *Birokrasi dan Tata Kelola Publik*, *Sistem Kebijakan Publik*, *Dinamika Manajemen SDM*, *Dinamika Kemitraan Sektor Publik*, dan *Inovasi dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Komitmen tersebut berlanjut pada 2026 melalui penerbitan

Manajemen Budaya Organisasi dan Aplikasinya, *Budaya, Etika, dan Profesionalisme dalam Organisasi*, *Budaya dalam Konteks Global*, *Manajemen Destinasi Pariwisata*, serta *Etika Publik dan Good Governance*. Keseluruhan karya tersebut merupakan bentuk komitmen penulis dalam memperkaya literatur serta mendukung pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Fajar Ifan Dolly, S.Sos., M.Si



Penulis lahir di Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 24 November 1991, putra pertama dari Bapak Harmaini dan Ibu Nurhayati. Lulus S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio dengan Konsentrasi Kebijakan Publik pada tahun 2014. Lulus S2 pada Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Pada tahun 2017, menjadi dosen tetap Yayasan Setih Setio pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo Jambi, sekarang Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio, dengan mengajarkan Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Sistem Administrasi Negara Indonesia, *Good Governance* dan Seminar Proposal Penelitian. Buku yang sudah di terbitkan berjudul: Kebijakan Publik dan *Governance*: Memahami Teori dan Inovasi.

Dr. Untung Muhdiarta, M.Si



Penulis lahir di Pagilaran, Batang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 1965. Pendidikan SD Negeri Inpres Pagilaran, SMP Negeri 3 lulus 1981 dan SMA Negeri Pekalongan lulus 1984. Kuliah S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan, lulus tahun 1989. Magister S2 Ilmu Administrasi Negara juga ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2003.

Sedangkan gelar doktor diraihnya di Universitas Hasanuddin Makassar pada bidang ilmu Administrasi Publik, lulus tahun 2016. Akademisi Universitas Cenderawasih sejak 1991 dan sekarang Lektor Kepala pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pernah menduduki posisi Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2013, kemudian menjadi Pembantu Dekan II FISIP UNCEN pada tahun 2017. Saat ini menduduki posisi Ketua Jurusan Ilmu Politik dan menjadi anggota peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi *(Democratic Center)* Universitas Cenderawasih. Mengajar di Program S1, dan Program Magister S2 MAP, S2 MKP, S3 PDIS Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

Dr. Hiskia C.M. Sapioper, S.Sos, M.Si



Penulis lahir di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pada tanggal 21 Agustus 1967. Penulis menempuh jenjang pendidikan Sarjana (S.1) di Universitas Cenderawasih dan lulus pada tahun 1993. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister (S.2) pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada tahun 2004. Pendidikan Doktor (S.3) diselesaikan pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan lulus pada tahun 2017. Saat ini, penulis aktif menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik pada Pascasarjana Universitas Cenderawasih. Beberapa karya buku ilmiah yang telah diterbitkan oleh penulis antara lain: (1) Strategi dan Struktur Birokrasi menuju *Good Governance* dalam Buku Memahami *Good Governance* dalam Perspektif Sumber Daya Manusia (Gava Media, 2011); (2) Perspektif Sistem Administrasi Negara Indonesia (Cv. Amerta Media, 2022); (3) Evaluasi Kebijakan dan Pengukuran Dampak Kebijakan (Uncen Press, 2024); (4) Manajemen Pelayanan Publik Pendekatan Strategis (Yayasan Putra Adi Dharma, 2024); serta (5) Etika Publik dan *Good Governance* pada Bab 11: Partisipasi Publik dan Etika Birokrasi (Widina Media Utama, 2026).

Rhina Pongtuluran, S.IP., M.KP.



Penulis lahir di Wamena pada tanggal 20 Januari 1985. Menempuh pendidikan jenjang S1 dengan jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yapis Papua (2011); Pendidikan S2 dengan jurusan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Cenderawasih (2019). Saat ini sebagai Dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapis Papua (2020 – Sekarang). Email: rhinapongtuluran85@gmail.com.

Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP.



Penulis lahir di Bangkalan pada tahun 1979. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen tetap Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas W.R. Supratman (FISIP UNIPRA) Surabaya. Sejak awal tahun 2025 diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Administrasi Bisnis. Dari keilmuan penulis memiliki latar keilmuan multidisipliner di bidang hukum, pendidikan Islam, dan administrasi publik. Jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S.H) 2004, Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) 2005, Magister Hukum (M.H) 2008, dan Magister Administrasi Publik (M.AP) 2025, serta saat ini menempuh program doktoral Ilmu Administrasi. Sejak 2015, penulis aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mata kuliah yang diampu meliputi SANRI, Pendidikan Pancasila, Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Retribusi dan Pajak, Pemodelan Bisnis, Politik dan Administrasi Agraria dan Harmoni W.R. Supratman. Dalam bidang akademik, Penulis aktif menulis artikel ilmiah, buku ajar, dan *book chapter* yang berfokus pada administrasi publik, hukum administrasi, dan administrasi bisnis. Salah satu karyanya adalah *Legitimasi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik*, yang menjadi rujukan dalam kajian tata kelola pemerintahan modern.

Chamid Sutikno S.IP., M.Si



Penulis lahir di Wonosobo tanggal 16 Januari 1992. Menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2014. Melanjutkan jenjang S2 pada program pasca sarjana Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018. Saat ini menjadi dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Selain aktif mengajar, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan dengan fokus bidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah dalam bentuk artikel jurnal dan terbit pada beberapa jurnal nasional terakreditasi Sinta. Saat ini menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto periode 2022-2027. Email : Sutiknochamid@gmail.com, No Hp: 082135015327.

Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P



Penulis merupakan seorang akademisi dan peneliti yang mendedikasikan kariernya pada kajian Administrasi Publik. Saat ini, beliau mengemban amanah sebagai Dosen Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda, Bogor. Di samping pengabdiannya di dunia pengajaran, riwayat pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Djuanda, S2 Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda. Saat ini beliau tengah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Studi Doktor (S3) Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepakaran utama beliau berpusat pada bidang Governansi, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. Dedikasi akademiknya dibuktikan melalui rekam jejak

publikasi yang ekstensif pada berbagai jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional bereputasi (Scopus), dengan fokus riset seputar *collaborative governance*, pelayanan publik, serta Kebijakan Publik. Kiprahnya sebagai pengamat kebijakan kerap mewarnai media massa daring, di mana ia secara aktif memberikan tanggapan komprehensif terkait dinamika kebijakan pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas jejaring akademik dan kolaborasi riset, penulis sangat terbuka untuk berdiskusi, bertukar gagasan, maupun menjalin kerja sama strategis dengan sesama akademisi, praktisi kebijakan, dan masyarakat luas. Korespondensi, diskusi ilmiah, maupun inisiasi riset bersama dapat ditujukan langsung melalui *e-mail*: faisaltr@unida.ac.id.

Muhlin, S.Sos., M.Si



Penulis lahir di Kampangar tanggal 18 Juli 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tompotika Luwuk pada tahun 2008 dan Magister Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Sejak 2008, penulis mengabdi sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk. Saat ini, penulis menduduki jabatan fungsional Lektor dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Bidang kajiannya meliputi administrasi dan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pelayanan dan inovasi publik, transformasi digital pemerintahan, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian pada isu tata kelola desa, *stunting*, pariwisata berkelanjutan, desa cerdas, dan evaluasi inovasi pelayanan publik. Email: muhlin_fisip@untika.ac.id. HP/WA: 085256627555**.**



LEGITIMASI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Mengapa masyarakat menerima dan mempercayai pemerintah? Dan bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan setiap kewenangan, keputusan, serta kebijakan yang dijalankannya? Pertanyaan tersebut menjadi pijakan utama dalam memahami legitimasi dan akuntabilitas administrasi publik.

Di tengah perubahan dari birokrasi hierarkis menuju New Public Management, serta berkembangnya pendekatan public value dan tata kelola kolaboratif, pemerintah tidak lagi cukup dinilai berdasarkan legalitas kewenangannya. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Legitimasi bukanlah modal kekuasaan yang bersifat tetap, melainkan kepercayaan publik yang harus terus dibangun dan diperbarui melalui setiap keputusan dan tindakan pemerintahan.

Buku Legitimasi dan Akuntabilitas Administrasi Publik mengajak pembaca memahami hubungan antara kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab, integritas aparatur, transparansi, dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, administrasi publik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mencapai hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut dicapai secara sah, bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Pemerintahan

ISBN 978-634-317-391-5

9 786343 173915